

## PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DALAM INSTANSI APARATUR DESA

**Mochamad Wahyudi, Dian Elok Pitajeng dan Bambang Hadi Prabowo**  
Program Studi Magister Manajemen STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

***Abstract** The purpose of this research is truthfully wanting to know how well the information system implemented in the government agencies of the village apparatus and the influence of the application of information systems and technology on the village government specifically public transparency in order for improving the standard of public services. Scope of study we studied the Village Wringinputih, District Muncar, Banyuwangi. The problems that exist in government agencies of Wringinputih Village are the complexity of public servant procedures such as the making of Identity Card (KTP), Certificate, Delivery of Raskin Assistance, and so forth. In addition, the implementation of services performed to the community seemed stiff and unfriendly. So that makes people disappointed in public services and become less participative. This causes the good name of the Wringinputih Village institution as a public service institution in the village to be bad. This study we established by implementing descriptive qualitative research method using library study data collection.*

***Keywords:** Information System, Transparency, Institution, and Public Service*

**Abstrak** Pembahasan studi ini ditujukan tak lain guna memahami seberapa baik sistem informasi yang diimplementasikan pada instansi pemerintah aparatur Desa dan pengaruh dari penerapan sistem informasi dan teknologi pada perangkat desa khususnya transparansi public untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lingkup studi yang kami teliti yakni Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang ada pada instansi pemerintah Desa Wringinputih diantaranya rumitnya alur prosedur pelayan publik contohnya adalah pembentukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan, Penyerahan Bantuan Raskin, dan lain sebagainya. Selain itu, pelaksanaan servis yang dilakukan kepada masyarakat terkesan kaku dan tidak ramah. Sehingga membuat masyarakat kecewa atas pelayanan publik dan menjadi kurang partisipatif. Hal ini menyebabkan nama baik instansi Desa Wringinputih sebagai Instansi pelayanan publik di desa menjadi buruk. Pembahasan studi ini penulis lakukan dengan menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data studi Pustaka.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, Transparansi, Instansi, dan Pelayanan Publik

### PENDAHULUAN

Sistem informasi adalah gabungan dari teknologi dengan kegiatan pengguna teknologi dalam membantu pengerjaan suatu aktivitas manajemen, yang salah satunya adalah dengan memasukkan sejumlah data yang nantinya dapat dibentuk menjadi output berupa informasi. Pada era digital seperti sekarang, sistem informasi menjadi kebutuhan primer bagi kebanyakan organisasi. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi perusahaan dalam menyamakan diri di pasar global dan mengetahui inovasi yang ada. Selain itu, sistem informasi dan teknologi bermanfaat di berbagai hal diantaranya meminimalisasi biaya (efiektivitas dan efisiensi), menimalisasi tindak pelanggaran, memudahkan dalam transfer informasi, menambah jejaring sosial kaitannya dengan stakeholder, dan masih banyak lagi. Dalam lingkup pemerintahan, penerapan sistem informasi salah satunya berguna untuk mempermudah aksesibilitas informasi kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan transparansi dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Walaupun demikian, penerapan sistem informasi pada kantor Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, khususnya di kalangan aparatur desa. Sebagian besar penduduk maupun aparatur desa masih mengalami kendala dalam hal pengetahuan teknologi dan informasi, sehingga informasi yang seharusnya bermanfaat bagi publik desa tersebut belum bisa diterima dengan mudah.

Kantor Desa Wringinputih merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik berlokasi di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kantor Desa ini memiliki tugas untuk melayani pelayanan publik antara lain penerapan jasa bantuan, penerimaan komplain dari publik, pengaturan data, pengecekan instansi, pemberian informasi terhadap publik, serta pemberian jasa perundingan. Salah satu bentuk dari penerapan layanan yang diterapkan pada Instansi Daerah seperti kebanyakan lainnya yaitu, pembentukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), naskah pernyataan tidak mampu, serta aktivitas pelaporan yang lain.

Sebagaimana instansi yang melaksanakan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Kantor Desa Wringinputih harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Namun pada kenyataannya masih banyak wanprestasi dalam lapangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan pelayanan publik. diantaranya rumitnya alur prosedur pelayanan publik contohnya dalam pembentukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), naskah pernyataan tidak mampu, pemberian santunan beras miskin yang tidak tepat, lamanya waktu tunggu dalam administrasi surat menyurat, kurangnya transparansi program kegiatan dan masih kurangnya penerapan sistem informasi dan teknologi yang digunakan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat terkesan kaku dan tidak ramah. Sehingga membuat masyarakat kecewa atas pelayanan publik dan menjadi kurang partisipatif dalam memanfaatkan pelayanan publik. Berdasarkan pada landasan pembahasan bisa dibentuk pertanyaan penelitian seperti berikut ini: Pertama, Bagaimana Sistem Informasi dan Teknologi bekerja dalam meningkatkan transparansi kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Desa Wringinputih? Kedua, Bagaimana optimalisasi Sistem Informasi dan Teknologi terhadap kinerja aparatur Desa Wringinputih? dan; Ketiga, Apa dampak dari penerapan sistem informasi dan teknologi terhadap pelayanan publik aparatur kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan sejumlah capaian yang diharapkan pada pembahasan studi ini yaitu: Pertama, Supaya dapat memahami serta menilai bagaimana Sistem Informasi dan Teknologi bekerja dalam meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah khususnya di Desa Wringinputih. Kedua, Supaya dapat memahami serta menilai bagaimana optimalisasi Sistem Informasi dan Teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Ketiga, Supaya dapat memahami serta menilai bagaimana dampak dari penerapan Sistem Informasi dan Teknologi terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan kegunaan yang dapat diberikan oleh pembahasan studi ini yaitu: Pertama, Meningkatkan transparansi kinerja Instansi Pemerintahan Desa Wringinputih, Kedua, Meningkatkan kualitas kinerja dengan menerapkan Sistem Informasi dan Teknologi Desa Wringinputih, Ketiga. Meningkatkan nilai instansi dan tingkat partisipasi warga dalam program dan kegiatan yang dicanangkan di Desa Wringinputih. Kontribusi yang ingin dicapai dalam pembahasan studi ini yaitu:

1. Bisa menambah kekayaan pembahasan mengenai kinerja Pemerintah Desa,
2. Dapat memberikan kontribusi untuk dapat merealisasikan peningkatan performa dari instansi Desa, yang dapat mencakup semua aspek yang telah ditentukan,
3. Dapat meningkatkan transparansi kinerja Instansi Pemerintahan Desa Wringinputih dengan membuat sistem informasi terintegrasi sehingga seluruh perangkat desa dan masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi program desa,
4. Dapat meningkatkan kualitas kinerja dengan menerapkan Sistem Informasi dan Teknologi Desa Wringinputih yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti membuat kotak saran atau sistem yang mempermudah masyarakat memberikan masukan terhadap kinerja dan pelayanan perangkat desa,
5. Dapat meningkatkan nilai instansi dan tingkat partisipasi warga dalam program dan kegiatan yang dicanangkan di Desa Wringinputih sehingga seluruh program desa dapat terealisasi dan masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya terhadap jalannya program yang dibuat pemerintah desa.

Suatu sistem di dalam sebuah instansi yang menggabungkan keperluan dalam pengaturan proses bisnis setiap harinya, penunjang kegiatan, memiliki sifat tentang pengaturan

dalam aktivitas pengelolaan pada sebuah instansi serta penyediaan jasa pada entitas lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pelaporan oleh instansi (Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto, 2005: 18). Sebuah tata cara pada instansi tertentu yang menggabungkan keperluan dalam pengaturan proses bisnis setiap harinya yang menunjang peran kegiatan bisnis dari instansi tersebut yang memiliki sifat tentang pengaturan dalam aktivitas pengelolaan pada sebuah instansi serta penyediaan jasa pada entitas lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pelaporan oleh instansi (Sutabri, 2005: 42). Sistem memiliki arti dalam bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) merupakan sebuah tata cara yang terbentuk atas sejumlah faktor yang saling dikaitkan supaya dapat membantu jalannya arus data. Informasi memiliki arti dalam bahasa Perancis kuno (*informacion*) serta berasal dari bahasa Latin (*informationem*) yang bermakna konsep, ide, atau garis besar. Penjelasan dari McLeod (2008), Sistem informasi merupakan sebuah tata cara yang mempunyai kegunaan dalam menampung data dari seluruh pusat data serta menerapkan sejumlah alat dalam memperlihatkan data tersebut. Sehingga, sistem informasi bisa dikatakan sebagai prosedur pengolahan sumber data dari sejumlah pusat data dengan menggunakan sejumlah proses sehingga nantinya dapat diperlihatkan melalui penyajian informasi terhadap kelompok yang berkepentingan.

Komponen teknologi informasi adalah unsur yang muncul akibat efek dari penerapan teknologi informasi. Seesar (2010: 6), menjelaskan dimana teknologi informasi terbentuk atas 3 (tiga) unsur terpenting yaitu, Kesatu, perangkat keras (*hardware*) adalah unsur jasmani yang membentuk suatu teknologi informasi. Sebagai contoh seperti layar, papan ketik, mouse, mesin print, disk data, RAM, prosesor, CD tray, kabel listrik, parabola, motherboard, serta berbagai I/O. Nomor dua, perangkat lunak (*software*) adalah alat yang dibentuk guna kebutuhan tertentu yang diri dari sistem yang mengkalkulasi hal yang wajib diterapkan pada komputer. Perangkat lunak (*software*) bisa dibedakan kedalam tiga hal, antara lain:

- a. Sistem *software*, adalah perangkat lunak yang dibentuk secara spesifik guna mengatur seluruh perangkat keras, yang artinya seluruh perangkat keras dalam teknologi informasi bisa berfungsi secara bersamaan dalam suatu kesatuan sistem. Contohnya adalah Sistem Operasi *Window, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD*.
- b. Program *software*, adalah perangkat lunak yang bisa dipakai dalam membentuk Sistem *software* dan juga pada Aplikasi *software*. Contohnya adalah *Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler, dan Java*.
- c. Aplikasi *software*, adalah program yang sudah siap digunakan serta dibentuk guna kebutuhan spesifik. Contohnya dalam kebutuhan multimedia yaitu seperti *Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player*. Kebutuhan program bisnis seperti *Microsoft Office* dan *Open Office* yang terdiri dari sejumlah aplikasi lainnya yang berguna dalam hal pengaturan kata-kata, penghitungan, informasi serta publikasi.

Nomor tiga, Manusia (*brainware*) adalah pengguna atau operator yang memiliki peran dalam penggunaan mesin komputer, contohnya yaitu Sistem Analis, Web Master, Web Designer, Animator, Programmer, Operator, User dan lain-lain. Diketahui adanya fungsi yang bisa diterapkan oleh manusia pada penggunaan program komputer, contohnya yaitu Analis system, Programmer, Operator dan Teknisi.

Teknologi informasi pada masa kini merupakan faktor yang diutamakan sebab telah banyak instansi pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas instansinya. Penggunaan teknologi informasi dalam instansi pemerintahan tentu saja mempunyai capaian yang tidak sama disebabkan penggunaan teknologi informasi dalam sebuah instansi berguna dalam menunjang kebutuhan instansinya. Penjelasan mengenai salah satu capaian dari penerapan teknologi informasi oleh Sutarman (2009: 17), yaitu guna menyelesaikan permasalahan, memunculkan ide-ide baru, serta menambah ketepatan serta kelancaran ketika menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya juga terdapat 6 (enam) kegunaan dari teknologi informasi oleh Sutarman (2009: 18), yakni: a. Menangkap (*Capture*) b. Mengolah (*Processing*) c. Menghasilkan (*Generating*) d. Menyimpan (*Storage*) e. Mencari kembali (*Retrieval*) f. Transmisi (*Transmission*). Jogiyanto (2005: 23), juga menjelaskan bagaimana teknologi informasi memiliki fungsi penting pada suatu instansi yakni guna menambahkan:

Efisiensi, Efektivitas, Komunikasi dan Kompetitif. Penerapan dari teknologi informasi adalah bentuk kesepakatan seseorang maupun organisasi yang berdampak pada peningkatan keahliannya. Penerapan dari teknologi informasi berhubungan terhadap tata cara yang artinya setiap anggota wajib meyakini bahwa ketika menerapkan suatu prosedur khusus mereka dapat terbebas dari bentuk upaya tertentu dengan menerapkan prosedur penggunaan program komputer. Menurut Igbaria dalam Thai Fung Jin (2002: 16), Teknologi informasi memiliki sifat aplikatif dan lebih fokus terhadap pengaturan arus data pada suatu badan usaha, melalui penggunaan program komputer serta sistem komunikasi dapat lebih menambah kinerja serta ketetapan pengerjaan tugas. Pada masa kini teknologi informasi telah bertumbuh secara pesat. Dimana mayoritas dari sektor kegiatan bisnis serta manufaktur telah dipengaruhi oleh teknologi informasi, antara lain pada sektor hiburan, pengobatan, edukasi, keuangan serta hingga pada pelaksanaan kebijakan pemerintah atau juga sering disebut dengan *electronic government*.

Informasi merupakan bentuk pencatatan, kata-kata, ide, serta pertanda yang memiliki angka, arti, serta maksud, berupa data, bukti dan juga pemahamannya yang bisa dinilai, dipahami, serta dibuktikan yang dapat dirangkum melalui bermacam media serta bentuk yang mengikuti pada perubahan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi Publik merupakan bentuk informasi yang dibuat, dipelihara, diatur, diberikan kepada/untuk organisasi serta kegiatan organisasional dari bidang usaha lain yang merujuk pada peraturan ini dan juga data lainnya yang berdasarkan kesepakatan publik (UU No. 14, 2008).

Berdasarkan Schein (1985), organisasi merupakan sebuah upaya pengaturan terhadap seluruh kegiatan yang logis dari beberapa individu dalam memenuhi kebutuhan dengan cara membagi tugas dan peran struktur organisasi dan juga kewajiban setiap anggota. Berdasarkan Poerwadarminta (1984), organisasi merupakan sebuah hukum yang terbentuk atas seluruh serpihan yang kemudian disatukan kedalam sebuah kesatuan yang terstruktur. Berdasarkan Robbins (2017), organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang terstruktur berdasarkan kesepakatan serta dibuat berlandaskan kepentingan serta kebutuhan bersama.

Badan Publik merupakan sebutan bagi badan eksekutif, legislaif, yudikatif, dan badan lain yang peran serta pekerjaan intinya berhubungan pada proses kegiatan kenegaraan, yang beberapa maupun semua pemasukannya berasal dari keuangan penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah pusat serta/maupun keuangan penerimaan serta pengeluaran pemerintah daerah, dan juga kelompok yang bukan instansi negara selama beberapa maupun semua pemasukannya berasal dari keuangan penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah pusat serta/maupun keuangan penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah daerah, pembayaran pajak, serta/maupun dari investasi asing (UU No. 14, 2008).

Pemahaman tentang pelayanan umum merujuk penjelasan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 merupakan semua penerapan aktivitas pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah yang dapat berupa barang dan jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik dan juga ditujukan untuk penerapan hukum dalam aturan undang – undang yang berlaku (Boediono, 2003: 61).

Pemberi layanan bertugas melayani kebutuhan individu maupun publik yang memiliki kebutuhan terhadap suatu instansi yang berdasarkan pada peraturan utama serta sistem yang (Kurniawan dalam Sinambela, 2006: 5). Berdasarkan UU No. 25 (2009), Pelayanan publik merupakan aktivitas atau runtutan aktivitas yang diterapkan untuk menjabawab keperluan pelayanan yang berdasarkan aturan undang-undang untuk seluruh masyarakat serta pengguna kebutuhan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang ditawarkan oleh pelaksana pelayanan publik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif merupakan pembahasan mengenai studi yang sifatnya deskriptif serta biasanya menerapkan sistem analisa. Sugiyono (2011: 15), mengatakan dimana metode penelitian kualitatif merupakan teknik pembahasan studi yang didasarkan pada filsafat

postpositivisme, dan dipakai guna mengkaji tentang keadaan obyek yang sebenarnya, sebaliknya penggunaan teknik eksperimen adalah ketika penulis merupakan instrument kunci, pengumpulan sampel pusat informasi diterapkan menggunakan teknik purposive dan snowball, metode pengambilan sampel menggunakan triangulasi (gabungan), analisa data memiliki sifat induktif/kualitatif, serta temuan dari penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna dibandingkan generalisasi. Capaian dalam penelitian kualitatif yaitu guna memahami keadaan sosial dengan lebih berfokus terhadap penjelasan menyeluruh mengenai kejadian yang sedang diteliti dibandingkan penjelasan secara detail kedalam faktor-faktor yang berhubungan.

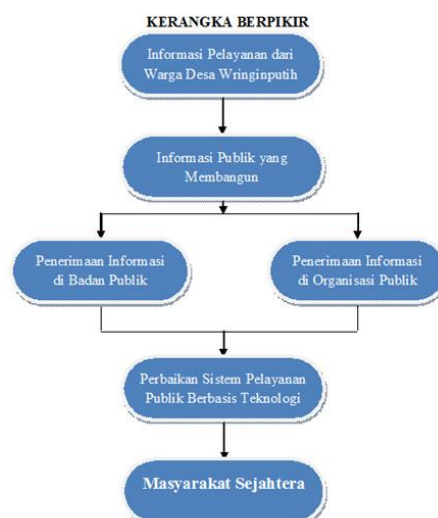
Pembahasan studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif serta pengambilan data dalam pembahasan studi ini menerapkan tiga bentuk metode pengambilan data, yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui penerapan alat bantu seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan alat dokumentasi seperti foto kamera dan alat perekam wawancara.

Dalam pelaksanaan pembahasan studi ini, informan diarahkan supaya menunjukkan komentar, pernyataan, sanggahan serta kesaksiannya mengenai penggunaan sistem informasi dan teknologi yang ada di Desa Wringin Putih dalam pelaksanaan pelayanan publik. Analisa data diterapkan melalui pengambilan data yang dapat berupa penerapan focused group discussion (FGD), wawancara tak terstruktur, maupun melalui observasi.

Ruang lingkup pada pembahasan studi ini terdiri atas tiga kelompok. Kesatu, menyajikan analisa penerapan sistem informasi dan teknologi yang telah digunakan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Desa Wringin Putih, melalui kajian data sekunder yang berasal dari historis sistem pelayanan publik di Desa Wringin Putih. Kedua, menganalisis optimalisasi Sistem Informasi dan Teknologi dalam pelayanan publik terhadap kinerja aparatur Desa Wringinputih. Ketiga, merekam perspektif masyarakat sebagai konsumen pelayanan Publik di Desa Wringinputih terhadap terhadap kebijakan penerapan Sistem Informasi dan Teknologi yang terintegrasi

### Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya perencanaan progam pemerintah di Kabupaten Banyuwangi kepada Desa bisa dikategorikan telah sukses, pernyataan tersebut dibuktikan melalui keberadaan penerapan sistem informasi dan teknologi yang sifatnya extranet yakni E-village Budgeting adalah kebijakan dalam memajukan keterbukaan keuangan serta pengawasan pembentukan infrastruktur pada penjuru desa (Pembab. Banyuwangi, 2016).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dengan organisasi publik harus terjalin dengan baik, agar dapat berjalan beriringan untuk membuat sistem atau alur organisasi dan pelayanan organisasi kepada publik bisa diterapkan serara tepat serta tidak ada kelompok yang dikesampingkan kebutuhannya sehingga dapat membuat masyarakat sejahtera.

Fokus dari penelitian ini tak lain untuk mengukur seberapa besar peran sistem Informasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa Wringin Putih Kecamatan Muncar dalam melaksanakan pelayanan public. Berlandaskan peraturan pelayanan publik yang merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah seperti di bawah ini:

1. Kesederhanaan Pelayanan
2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan
3. Keamanan dalam Pelayanan
4. Keterbukaan dalam Pelayanan
5. Efisiensi dalam Pelayanan
6. Ekonomis dalam Pelayanan
7. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan
8. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Sejumlah 189 desa meupun semua desa yang ada pada Banyuwangi sudah menggunakan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring). Pembuatan sistem ini guna menyelaraskan dan menyamakan anggaran serta pembentukan infrastruktur pada penjurur desa terhadap kabupaten. Di sisi lain juga berguna dalam melindungi penyelewengan oleh aparatur desa pada saat penerapan anggaran agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi pada realisasinya aparatur di Desa Wringin Putih terdapat beberapa hal yang merugikan dan berakibat nama baik dari instansi aparatur Desa Wringinputih menjadi buruk. Permasalahan – permasalahan yang ada pada umumnya terjadi menjadi bukti antara lain;

1. Rendahnya informasi terkait kegiatan maupun program kegiatan.
2. Rendahnya tingkat transparansi kinerja dan kegiatan yang telah dicanangkan.
3. Pembangunan desa yang terhambat.
4. Prosedur pelayanan publik yang rumit.
5. Minimnya penggunaan sistem informasi dalam melakukan pelayan publik terhadap masyarakat.
6. Banyaknya waktu tunggu dalam mengurus administrasi.
7. Pelayanan yang tidak ramah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi literatur yang ada memberikan hasil bahwa, pengetahuan sistem informasi di Desa Wringin Putih masih dalam tingkatan yang rendah. Walaupun tingkat teknologi dan sistem informasi di Banyuwangi dapat dikatakan meningkat akan tetapi untuk penerapannya sendiri masyarakat awam masih belum dapat dikatakan mengerti dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai sistem informasi pada aparatur desa.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu menciptakan suatu wadah ataupun media yang merupakan hasil dari sistem informasi dan teknologi yang berguna untuk melayani masyarakat desa secara memadai. Seperti halnya membuat website ataupun media sosial yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi desa, maupun pelayanan desa.

Untuk warga yang masih belum mengenal atau memahami penggunaan internet, instansi Pemerintah Desa Wringin Putih juga tetap dapat melakukan sosialisasi secara manual, atau bisa juga melibatkan partisipasi warga yang sudah memahami teknologi dan sistem informasi untuk bisa membantu kepada warga yang belum mengenal internet dalam rangka membantu meningkatkan kinerja aparatur desa.

### **Simpulan**

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa tujuan utama pembahasan studi ini untuk mengukur seberapa besar peran sistem Informasi dalam meningkatkan kualitas kinerja

pemerintahan desa Wringin Putih Kecamatan Muncar dalam melaksanakan pelayanan publik kepada penduduk setempat sebagai pemakai dari pelayanan publik tersebut. Dengan meningkatkan kedisiplinan saat bertugas bagi aparatur instansi daerah, kemudian dilanjut pada tingkat kecamatan dan desa yang mencukupi dapat menghasilkan pengaruh yang positif pada penduduk di wilayah tersebut. Adanya keterlibatan dari peningkatan kedisiplinan saat bertugas diharapkan dapat menghasilkan hubungan positif dari aparatur serta masyarakat dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas publik mengenai sistem informasi terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Pentingnya, sistem informasi salah satunya berguna untuk aksesibilitas informasi, transparansi dan meningkatkan tingkat pelayanan publik. Sehingga, dibutuhkan upaya penerapan sistem informasi yang tepat serta adanya edukasi sistem informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan publik yang disediakan pada Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar. Selain itu, perlunya menerapkan sistem informasi pelayanan publik berdasarkan prinsip umum pelayanan publik untuk menciptakan transparansi dan, dan akuntabilitas publik. Sehingga masyarakat dapat menikmati sistem informasi dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- McLeod, R. J. (2008). *Sistem Informasi Manajemen* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pemkab. Banyuwangi. (2016, 29 Februari). 189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting. *Berita Daerah*. banyuwangikab.go.id. Diambil dari: <https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-des-a-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html>.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Robbins, S. P. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Ohio: Pearson.
- Schein, E. H. (1985). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Seesar, Y. A. (2010). *Perbandingan Implementasi Insourcing, Co-Sourcing, dan Outsourcing dalam Pengembangan Sistem Informasi*. Bogor: Majalah Ilmiah IPB.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thai Fung Jin. (2002). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik*. (S2 Thesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- UU No. 14. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/14TAHUN2008UU.htm>.
- UU No. 25. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.